



Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Pemukiman terhadap Kesejahteraan Petani di Kota Serang

Rudi Hidayat¹, Aliudin², Naiya Izzatunnisa³, Salsabila Analicia⁴, Situmorang Corrina Viorth Evalin⁴, Aditya Firmansyah⁵

^{1,2,3,4,5}Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Serang, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Juli 30, 2025

Revised Juli 30, 2025

Accepted Juli 30, 2025

Kata Kunci:

Alih Fungsi Lahan,
Lahan Pertanian,
Pemukiman,
Sumber Daya Ekonomi,
Kota Serang

Keywords:

Land Conversion,
Agricultural Land,
Settlements,
Economic Resources,
Serang City

ABSTRAK

Alih fungsi lahan merupakan suatu proses perubahan lahan dari fungsi semula. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman terhadap kesejahteraan para petani di Kota Serang, Provinsi Banten. Sebagai ibu kota provinsi, Kota Serang mengalami laju pertumbuhan populasi dan urbanisasi yang sangat cepat, sehingga membuat tekanan yang besar pada lahan pertanian. Dengan memakai pendekatan kualitatif, penelitian ini menelusuri berbagai faktor yang mendasari pergeseran fungsi lahan, perubahan dalam kondisi ekonomi para petani, serta dampak yang ditimbulkan terhadap sumber daya ekonomi lokal. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pergeseran fungsi lahan menyebabkan berkurangnya jumlah lahan pertanian yang masih produktif, yang secara langsung berakibat pada penurunan produksi pangan dan penghasilan para petani. Banyak petani yang kehilangan mata pencaharian dan terpaksa beralih ke pekerjaan non-pertanian, seperti tenaga kerja bangunan atau usaha kecil. Situasi ini tidak hanya berdampak pada keadaan ekonomi para petani, tetapi juga mengancam ketahanan pangan daerah, akibat meningkatnya ketergantungan pada pasokan dari luar. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan perencanaan ruang yang lebih ketat, perlindungan terhadap lahan pertanian, serta strategi untuk memberdayakan ekonomi lokal demi menjaga keberlangsungan sektor pertanian dan meningkatkan ketahanan ekonomi masyarakat yang terkena dampak.

ABSTRACT

Land conversion is a process of changing land from its original function. This study aims to determine the impact of the conversion of agricultural land into residential areas on the welfare of farmers in Serang City, Banten Province. As the provincial capital, Serang City experiences very rapid population growth and urbanization, thus putting significant pressure on agricultural land. Using a qualitative approach, this study explores the various factors underlying the shift in land function, changes in the economic conditions of farmers, and the resulting impacts on local economic resources. The research findings indicate that land function shifts have led to a reduction in the amount of productive agricultural land, which directly results in a decrease in food production and farmers' incomes. Many farmers have lost their livelihoods and have been forced to shift to non-agricultural work, such as construction labor or small businesses. This situation not only impacts the economic situation of farmers but also threatens regional food security, due to increased dependence on external supplies. Therefore, stricter spatial planning policies, protection of agricultural land, and strategies to empower the local economy are needed to maintain the sustainability of

the agricultural sector and increase the economic resilience of affected communities.

This is an open access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Aliudin
Fakultas Pertanian, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Banten, Indonesia
Email: Aliudin@untirta.ac.id

1. PENDAHULUAN

Perkembangan zaman yang semakin pesat menuntut pembangunan yang terus dilakukan guna memenuhi berbagai kebutuhan. Pembangunan tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan lahan, sebab setiap kegiatan pembangunan pasti membutuhkan ruang atau tempat. Indonesia sebagai negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, secara otomatis mendorong peningkatan pembangunan di berbagai sektor seperti infrastruktur, industri, dan layanan jasa. Namun, proses pembangunan ini juga berdampak pada meningkatnya kebutuhan lahan yang cukup besar.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lahan pertanian pangan merupakan bagian dari sumber daya alam yang dikuasai negara dan dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat. Sebagai negara agraris, sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. Oleh sebab itu, negara wajib menjamin ketersediaan lahan pertanian secara berkelanjutan sebagai sumber penghidupan yang layak, dengan mengutamakan prinsip keadilan, efisiensi, berkelanjutan, dan berwawasan lingkungan. Negara juga bertanggung jawab dalam menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional, serta menjamin hak warga atas kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan.

Kota Serang, yang terletak di Pulau Jawa, secara administratif merupakan Ibu Kota Provinsi Banten. Kota Serang terdiri dari 6 kecamatan dan 67 kelurahan yaitu Kecamatan Cipocok Jaya, Kecamatan Curug, Kecamatan Kasemen, Kecamatan Serang, Kecamatan Taktakan, Kecamatan Walantaka. Letak geografis Kota Serang yaitu antara 106°07' – 106°25' Bujur Timur dan 5°99' – 6°22' Lintang Selatan, dengan mengaplikasikan koordinat sistem Universal Transfer Mercator (UTM) Zone 48E, wilayah Kota Serang berada pada koordinat 618.000 M s.d 638.600 M dari Barat ke Timur dan 9.337.725 M s.d 9.312.475 M dari Utara ke Selatan adalah sekitar 21,7 KM dan jarak terpanjang dari Barat ke Timur adalah 20 KM. Secara kondisi geografis, Kota Serang secara geografis didominasi oleh wilayah dataran sedang dengan ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan berada pada zona iklim tropis. Kondisi ini menyebabkan suhu rata-rata bulanan berkisar antara 23,2°C hingga 27,07°C, dengan kelembaban udara mencapai 84% dan curah hujan tahunan sebesar 1.500 hingga 2.000 mm. Tingginya intensitas hujan terutama terjadi pada bulan Desember dan Januari. Karakteristik iklim dan topografi tersebut menjadikan wilayah ini memiliki potensi besar untuk pengembangan sektor pertanian, khususnya dalam budidaya tanaman pangan dan hortikultura yang memerlukan kelembaban tinggi dan distribusi air yang stabil.

Sejak berubah status menjadi ibu kota provinsi, perkembangan fisik Kota Serang semakin pesat. Hal ini membuat Kota Serang menjadi salah satu wilayah yang mengalami penyusutan lahan pertanian, terutama sawah. Meskipun telah berstatus kota, Kota Serang masih memiliki lahan sawah yang cukup luas. Pada tahun 2019, luas sawah mencapai 8.474,75 hektar, namun mengalami penurunan sekitar

68,55 hektar dibanding tahun sebelumnya. Dalam beberapa tahun terakhir, lahan pertanian di Kota Serang mengalami tekanan yang cukup signifikan akibat meningkatnya laju pembangunan, urbanisasi, serta permintaan terhadap lahan permukiman.

Perkembangan infrastruktur dan pembentukan kawasan permukiman merupakan salah satu faktor utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Serang. Peningkatan jumlah penduduk dan proses urbanisasi telah membuat permintaan akan tempat tinggal dan area permukiman baru semakin tinggi. Situasi ini mendorong terciptanya berbagai kompleks perumahan, apartemen, dan daerah hunian yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal bagi masyarakat yang kian banyak.

Pembangunan kawasan permukiman ini seringkali memerlukan lahan yang cukup luas, yang sering kali berakibat pada hilangnya area pertanian yang produktif. Pergantian fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman di Kota Serang telah menimbulkan berbagai konsekuensi dalam sektor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Di satu sisi, pembangunan perumahan dan kawasan hunian yang baru dapat meningkatkan investasi di sektor properti, menciptakan peluang kerja baru, serta mendorong pertumbuhan ekonomi setempat melalui kegiatan konstruksi dan perdagangan. Dalam praktiknya, lahan-lahan yang semula difungsikan untuk kegiatan produksi pertanian mulai tergantikan oleh pembangunan kawasan hunian. Pada dasarnya, perubahan fungsi lahan pertanian ini dilarang sesuai dengan UU No. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, kecuali untuk tujuan kepentingan publik [1].

Jika kondisi ini terus berlanjut, maka setiap tahun lahan pertanian akan terus menyusut, sementara jumlah penduduk semakin bertambah. Hal ini berisiko menyebabkan kekurangan pasokan pangan, terutama padi yang merupakan komoditas utama. Ketahanan pangan adalah situasi di mana kebutuhan makanan bagi keluarga dapat dipenuhi, yang terlihat dari adanya pasokan makanan yang memadai, baik dari segi jumlah maupun kualitasnya, serta aman, seimbang, dan terjangkau [2]. Ketahanan pangan pada dasarnya berhubungan dengan ketersediaan makanan, kestabilan harga makanan, dan kemampuan untuk mengakses makanan. Asupan pangan tidak hanya berasal dari tanaman yang ditanam di lahan pertanian, tetapi juga bisa dihasilkan secara mandiri [3]. Menurut [4] ketahanan pangan di suatu negara adalah aspek yang sangat krusial, khususnya untuk negara dengan populasi yang besar seperti Indonesia. Diperkirakan jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 220 juta jiwa pada tahun 2020 dan diprediksi akan meningkat menjadi 270 juta jiwa pada tahun 2025. Dari laporan Statistik Ketahanan Pangan [5], posisi Indonesia adalah ke-69 dari 113 negara dengan nilai 59,2 berdasarkan evaluasi *Global Food Security Index (GFSI)*. GFSI dibuat oleh *Economist Intelligence Unit (EIU)* untuk menilai ketahanan pangan di tingkat negara melalui aspek keterjangkauan, ketersediaan, serta kualitas dan keamanan pangan. Peringkat tersebut menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam kategori rendah dibandingkan negara lainnya di seluruh dunia. Lebih lanjut, Indonesia juga berada di bawah beberapa negara lain di Asia Tenggara seperti Singapura yang mencatat skor 77,4; Malaysia 70,1; Thailand 64,5; Vietnam 61,1; dan Filipina 60,1. Oleh karena itu, perlindungan terhadap lahan pertanian pangan di Kota Serang perlu diperkuat sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, agar ketersediaan lahan tidak semakin menyempit atau bahkan hilang.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diperoleh masalah penelitian sebagai berikut: 1) Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di Kota Serang 2) Apakah terdapat perubahan ekonomi pada petani di Kota Serang dengan adanya pembangunan permukiman 3) Bagaimana dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman terhadap sumber daya ekonomi di Kota Serang.

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan pertanian menjadi permukiman di Kota Serang, 2) Menganalisis apakah terdapat perubahan kondisi ekonomi pada petani di Kota Serang setelah adanya pembangunan permukiman, 3) Menganalisis dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap sumber daya ekonomi di Kota Serang.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif karena dianggap paling relevan karena dapat menggambarkan secara rinci terkait dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman, khususnya terhadap kondisi ekonomi petani di Kota Serang. Metode ini dipilih karena mampu menggali kondisi faktual yang tidak bisa digambarkan dengan data kuantitatif karena tidak semua informasi bisa dijelaskan dengan angka numerik atau secara statistik. Penelitian ini berfokus pada wilayah yang terdampak secara langsung oleh alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman. Kota Serang yang menjadi ibu kota Provinsi Banten tentunya mengalami perkembangan yang pesat terutama pada pembangunan perumahan dan sarana prasarana perkotaan. Perkembangan Kota Serang ini dapat berdampak secara langsung terhadap pengurangan lahan selama beberapa dekade di beberapa kecamatan di Serang seperti Cipocok Jaya, Walantaka, dan Curug, dimana wilayah-wilayah tersebut menjadi wilayah dengan tingkat konversi lahan yang tinggi.

Penentuan informan dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, yaitu teknik penentuan sampel secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan tujuan penelitian. Teknik ini digunakan karena tidak semua wilayah atau masyarakat di Kota Serang mengalami dampak langsung dari alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan pemukiman. Oleh sebab itu, responden dipilih hanya dari mereka yang benar-benar berkaitan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Tidak semua masyarakat Kota Serang terdampak secara langsung terhadap alih fungsi lahan. Oleh karena itu, peneliti hanya mengambil responden yang benar benar terdampak secara langsung yang dijadikan sumber informasi. Contohnya adalah petani yang kehilangan lahan pertaniannya karena dijual untuk dijadikan daerah perumahan.

Responden dalam penelitian ini terdiri atas petani yang lahannya telah beralih fungsi menjadi pemukiman serta tokoh masyarakat yang memahami isu pengelolaan lahan dan kebijakan tata ruang di wilayah tersebut. Peneliti memastikan bahwa informan benar-benar memiliki pengalaman dan pengetahuan yang memadai terkait proses dan dampak alih fungsi lahan. Kriteria pemilihan responden ditentukan berdasarkan beberapa pertimbangan seperti pernah memiliki ataupun bekerja di lahan pertanian yang telah dialih fungsikan menjadi perumahan, masih menggarap aktivitas pertanian, dan responden yang mengetahui bagaimana alih fungsi lahan ini dapat berdampak pada ekonomi keluarga maupun masyarakat sekitar.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu wawancara, observasi langsung, dokumentasi, dan data sekunder (referensi). Wawancara dilakukan dengan cara semi-terstruktur, artinya peneliti sudah memiliki panduan pertanyaan, tapi juga memberi ruang bagi informan untuk bercerita bebas sesuai pengalamannya. Teknik ini dipakai supaya informasi yang diperoleh tidak kaku, dan peneliti bisa lebih fleksibel menyesuaikan arah diskusi. Observasi lapangan dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi lingkungan yang telah mengalami alih fungsi. Peneliti mengamati kondisi fisik seperti bekas lahan pertanian yang kini sudah menjadi perumahan, jalan beton, atau pusat bisnis kecil. Peneliti juga memperhatikan aktivitas warga sehari-hari, bagaimana interaksi sosial berubah, serta bagaimana pergeseran ekonomi terlihat dalam keseharian masyarakat. Dokumentasi digunakan sebagai alat bantu. Peneliti mengumpulkan dokumen-dokumen seperti data konversi lahan dari Badan Pusat Statistik (BPS), hingga sumber-sumber terkait yang membahas pembangunan perumahan di wilayah penelitian.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Faktor Alih Fungsi Lahan Pertanian menjadi Pemukiman di Kota Serang

Alih fungsi lahan adalah proses di mana penggunaan lahan diubah untuk tujuan tertentu, yang biasanya juga disertai dengan kenaikan nilai lahan [6]. Menurut Alinda et.all [7] Alih fungsi lahan adalah proses mengubah penggunaan sebagian atau seluruh area tanah dari fungsi asalnya ke fungsi baru yang dapat berdampak buruk bagi lingkungan serta potensi tanah tersebut. Perkembangan wilayah Kota

Serang dalam beberapa dekade terakhir sangat pesat, terutama permintaan masyarakat akan tempat tinggal. Permintaan akan tempat tinggal di Kota Serang begitu pesat mengingat Kota Serang merupakan ibu kota Provinsi Banten. Kota Serang memiliki fungsi yang strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Serang berkembang sebagai pusat perdagangan, pendidikan, dan jasa yang melibatkan masyarakat dari latar belakang ekonomi yang berbeda beda. Pertumbuhan penduduk di wilayah ini terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini menjadi salah satu faktor pendorong meningkatnya permintaan akan tempat tinggal. Namun, di sisi lain Kota Serang memiliki potensi pertanian yang besar karena lahan pertanian masih cukup luas. Tetapi, lahan pertanian kini mulai dialihfungsikan menjadi kawasan perumahan, pemukiman, dan industri. Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Banten mengenai luas panen lahan padi dari tahun 2021 hingga 2024.

Pada tahun 2021 tercatat luas lahan panen padi seluas 11.654,48 hektare. Namun, pada tahun 2022 mengalami penurunan menjadi 10.856,62 dan terus menurun hingga 10.501 pada tahun 2023. Namun, pada tahun 2024 luas panen padi mengalami peningkatan menjadi 11.010 hektar, jika digambarkan berdasarkan grafik luas lahan panen padi cenderung mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena meningkatnya pertumbuhan penduduk dan meningkatnya kebutuhan tempat tinggal.

3.2 Perubahan Kondisi Ekonomi pada Petani di Kota Serang Setelah Adanya Pembangunan Pemukiman

Menurut [8], kondisi ekonomi petani sangat dipengaruhi oleh perubahan dalam hasil produksi, kesempatan untuk menjangkau pasar, dan keberlanjutan sumber daya pertanian. Teori ini menjelaskan bahwa pendapatan petani tidak hanya berasal dari hasil pertanian tetapi juga dari diversifikasi usaha (pendapatan dari sektor non-pertanian), serta dipengaruhi oleh elemen luar seperti kebijakan harga, akses terhadap teknologi, dan adanya lembaga pendukung seperti koperasi dan penyuluh.

Pembangunan pemukiman di Kota Serang terus mengalami kemajuan seiring dengan meningkatnya permintaan masyarakat akan tempat tinggal. Banyak lahan yang sebelumnya digunakan untuk pertanian kini telah diubah menjadi kawasan pemukiman. Perubahan ini berdampak signifikan bagi para petani, terutama bagi mereka yang lahannya terkena alih fungsi. Meskipun demikian, para petani tidak langsung menghentikan aktivitas bertani. Mereka masih memiliki atau mengelola lahan lain yang belum terpengaruh pembangunan. Namun jelas, lahan yang dapat mereka kelola saat ini tidak sebanyak yang ada sebelumnya. Hal ini berakibat pada penurunan hasil pertanian dan secara otomatis berpengaruh pada pendapatan mereka.

Pengurangan luas lahan pertanian akibat perubahan fungsinya menjadi pemukiman berdampak langsung pada produktivitas petani. Para petani yang dulunya mengelola lahan seluas 2–3 hektar kini hanya memiliki lahan kurang dari 1 hektar. Situasi ini memaksa mereka untuk mengintensifkan pertanian di lahan yang tersisa, namun tidak selalu berhasil mempertahankan hasil yang sebanding dengan kondisi sebelumnya. Penganekaragaman lahan juga menjadi masalah serius karena lahan pertanian yang tersisa seringkali terfragmentasi dan tidak berkelanjutan, sehingga menyulitkan pengelolaan dan meningkatkan biaya operasional. Petani harus mengeluarkan biaya ekstra untuk transportasi dan pemeliharaan lahan yang terpisah.

Menurunnya penghasilan dari sektor pertanian mendorong banyak petani untuk mulai beralih ke diversifikasi ekonomi. Beberapa dari mereka menjadi buruh bangunan di proyek pemukiman yang sama yang menggusur lahan mereka. Kontradiksi ini menunjukkan bagaimana pembangunan menghadirkan peluang baru saat sekaligus menghilangkan mata pencaharian tradisional. Para istri petani juga semakin aktif mencari pendapatan tambahan, seperti membuka warung kecil, menjual makanan, atau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di kawasan pemukiman baru.

Situasi ini mendorong petani yang masih memiliki lahan untuk meningkatkan produksi melalui intensifikasi. Mereka mulai menggunakan teknologi pertanian modern, memilih bibit unggul, dan

meningkatkan frekuensi tanam. Meskipun memerlukan investasi yang lebih besar, pendekatan ini berhasil membantu mempertahankan tingkat produksi yang relatif stabil. Selain itu, banyak petani yang mengembangkan usaha sampingan seperti peternakan kecil, budidaya ikan di kolam, atau usaha pengolahan produk pertanian. Diversifikasi ini membantu mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan dan memberikan kestabilan ekonomi yang lebih baik.

Peran pemerintah sangat krusial. Pemerintah Kota Serang harus memastikan bahwa ganti rugi yang diberikan kepada petani tidak hanya mencakup harga tanah, tetapi juga mempertimbangkan hilangnya sumber pendapatan dalam jangka panjang. Program pelatihan keterampilan dan penyediaan modal usaha perlu dihubungkan dengan program kompensasi. Di samping itu, pemerintah dapat mendorong pengembangan agrowisata di lahan pertanian yang masih ada sebagai cara untuk meningkatkan nilai sektor pertanian. Konsep ini memberikan kesempatan bagi petani untuk mendapatkan penghasilan tambahan dari sektor pariwisata sambil tetap menjalankan kegiatan pertanian.

Pembangunan pemukiman di Kota Serang telah secara mendasar mengubah struktur ekonomi petani. Walaupun dihadapkan pada tantangan berupa berkurangnya luas lahan dan pendapatan, petani menunjukkan kemampuan beradaptasi yang luar biasa melalui berbagai cara bertahan. Perubahan ini bersifat tidak dapat dibalik dan membutuhkan pendekatan komprehensif dari semua pihak. Pemerintah, pengembang, dan masyarakat harus bekerja sama untuk memastikan bahwa pembangunan tidak hanya memberikan keuntungan untuk beberapa pihak saja, tetapi juga bermanfaat bagi petani yang terkena dampak. Di masa mendatang, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk menilai efektivitas strategi adaptasi petani dan dampak jangka panjang dari peralihan lahan pertanian terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan petani di Kota Serang.

3.3 Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Sumber Daya Ekonomi di Kota Serang

Pengembangan sumber daya ekonomi merupakan pendekatan pembangunan yang berbasis pada pemanfaatan potensi, kapasitas, dan sumber daya yang tersedia di suatu daerah untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Menurut G, Canzanelli [9] Pengembangan sumber daya ekonomi merupakan suatu proses yang tepat dan efektif dalam menciptakan kondisi yang kondusif bagi peningkatan lapangan kerja yang layak, pembentukan dan pertumbuhan usaha kecil dan menengah, serta peningkatan kualitas manusia (*human development*).

Dampak pengalihan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman adalah berkurangnya luas lahan pertanian sehingga lahan pertanian yang subur dialihkan pembangunan pemukiman, yang mengakibatkan berkurangnya kapasitas produksi pangan lokal dan berdampak pada ketahanan pangan. Terjadinya penurunan produksi pangan lokal, berkurangnya lahan pertanian, maka jumlah hasil pangan juga akan berkurang. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi ketersediaan pangan yang dapat diakses oleh warga di Kota Serang, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan. Walaupun Kota Serang merupakan daerah dataran rendah yang tidak dikelilingi oleh iklim yang dingin sehingga beberapa komoditi sayuran dan buah-buahan yang tumbuh di daerah pegunungan tidak mungkin tumbuh di Kota Serang sehingga membutuhkan impor dari daerah lain untuk memenuhi kebutuhan pangan. Namun, tidak semua kebutuhan pangan harus diambil dari daerah lain karena masih ada beberapa kebutuhan pangan yang bisa dihasilkan di Kota Serang yaitu melinjo, mangga, dan pisang, Hal ini dapat dibuktikan dengan data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Serang tahun 2025 mengenai produksi buah-buahan dan sayuran tahunan dari tahun 2021 hingga 2024. Jika terjadi pengalihan lahan secara terus menerus maka akan terjadi pengurangan dan ketergantungan Melinjo, Mangga, dan Pisang terhadap daerah lain secara terus menerus.

Dampak pada ekonomi petani adalah berkurangnya mata pencaharian petani karena para petani bergantung pada lahan pertanian, maka jika terjadi pengalihan akan terjadi kehilangan mata pencahariannya sebagai petani, maka dapat memicu masalah ekonomi seperti pengangguran dan juga kemiskinan. Jika pengalihan lahan akan terus terjadi tanpa memikirkan solusi untuk keseimbangan,

seiring berjalannya waktu Kota Serang akan kehilangan lahan pertanian. Sehingga perlu dibuat solusi agar hal tersebut tidak terjadi, solusinya ialah dibuat peraturan perlindungan lahan pertanian dengan mengeluarkan beberapa kebijakan untuk melindungi lahan pertanian dengan undang-undang. Membuat konsep pertanian berkelanjutan dan pertanian yang dapat dilakukan di daerah minim lahan dengan memanfaatkan penggunaan teknologi pertanian yang ramah lingkungan untuk menghasilkan kebutuhan pangan tanpa memerlukan lahan yang luas.

Dampak jangka panjang dari alih fungsi lahan ini adalah ancaman serius terhadap keberlanjutan ketahanan pangan wilayah. Berkurangnya lahan produktif tidak hanya mempengaruhi hasil produksi pangan, tetapi juga mengancam keberlangsungan sektor pertanian sebagai mata pencaharian utama masyarakat di Kota Serang. Kondisi ini diperburuk oleh status kepemilikan lahan, yang menjadi faktor penting dalam keputusan petani untuk melepas lahan mereka [10]. Salah satu dampak yang muncul dari situasi ini adalah pencaharian petani akan sumber penghasilan lain yang dianggap memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini mengakibatkan petani memiliki berbagai jenis pekerjaan baru atau memperbesar usaha yang sudah ada [11].

4. KESIMPULAN

Alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan permukiman di Kota Serang terjadi akibat meningkatnya urbanisasi dan posisi strategis kota tersebut sebagai ibu kota Provinsi Banten. Perubahan ini mengakibatkan berkurangnya luas lahan pertanian secara drastis, yang berdampak langsung pada kondisi ekonomi petani. Banyak petani kehilangan sebagian besar lahan garapannya, sehingga pendapatan mereka menurun dan memaksa mereka untuk mencari alternatif penghasilan, seperti bekerja di sektor informal, membuka usaha kecil, atau memaksimalkan hasil dari lahan yang tersisa melalui intensifikasi pertanian. Selain berdampak pada ekonomi petani, alih fungsi lahan juga mengancam ketahanan pangan lokal karena menurunnya produksi komoditas utama. Jika tidak segera ditangani, situasi ini dapat memperparah ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah dan mengancam kelangsungan sektor pertanian di masa depan.

REFERENSI

- [1] Triansyah, W., Risma, A., & Aswari, A. (2020). Alih Fungsi Lahan Sawah Tanah Redistribusi yang Diberikan Pemerintah. *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 1-26.
- [2] Tama, R. D., & Priyanti, E. (2022). Efektivitas Program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Dalam Upaya Ketahanan Pangan Keluarga di Desa Pasirkaliki Kabupaten Karawang Tahun 2021. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(20), 282-289.
- [3] Djamali, R. A., Mangesti, G. H., Putra, D. E., & Suharto, A. (2022). Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) di Kampung SDGS Bangsalsari Kabupaten Jember. *J-ABDI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 1(9), 2493-2502.
- [4] Chairani, R., Agustanto, D., Wahyu, R. A., & Nainggolan, P. (2020). Ketahanan pangan berkelanjutan. *Jurnal Kependudukan Dan Pembangunan Lingkungan*, 1(2), 70-79.
- [5] BPS. (2022). *Statistik Indonesia 2022*. Statistik Indonesia 2022, 1101001, 790.
- [6] Sari, R. W. S., & Yuliani, E. (2021). Identifikasi dampak alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian untuk perumahan. *Jurnal Kajian Ruang*, 1(2).
- [7] Alinda, S. N., Setiawan, A. Y., & Sudrajat, A. (2021). Alih Fungsi Lahan dari Sawah Menjadi Perumahan di Kampung Gumuruh Desa Nagrak Kecamatan Cangkuang Kabupaten Bandung. *GEOAREA| Jurnal Geografi*, 4(2), 55-67.
- [8] Winarto, H. P., & Pratama, A. F. (2021). Analisis Ketahanan Ekonomi Rumah Tangga Petani Berdasarkan Sumber Pendapatan di Kabupaten Malang. *Agriekonomika: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 10(1), 42-53.
- [9] Haridison, A., et al. (2022). Model Pengembangan Ekonomi Lokal: Studi Kasus Desa Sampirang

- I (Satu) Kecamatan Teweh Timur, Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 7(2), 85–101.
- [10] Noviyanti, E. C., et al. (2021). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Pendapatan Petani di Kabupaten Mimika. *Jurnal Kritis (Kebijakan, Riset, dan Inovasi)*, 5(1), 1–14.
- [11] Purwanti, T. (2020). Petani, Lahan dan Pembangunan: Dampak Alih Fungsi Lahan terhadap Kehidupan Ekonomi Petani. *Umbara*, 3(2), 95.